

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang cocok untuk dijadikan tujuan berwisata. Banyak sekali aspek yang dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyaknya potensi wisata di Indonesia menjadikannya banyak dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tujuan dari banyak wisatawan yaitu Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang masih kental dengan budayanya. Dinas Pariwisata DIY mencatat jumlah kunjungan wisata di daya tarik wisata Provinsi DIY dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan.

Gambar 1. 1

Jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, oleh karena itu Indonesia merupakan potensi bagi pasar industri wisata halal terbesar di dunia. Hal ini sudah seharusnya disadari oleh pemerhati bisnis pariwisata di Indonesia (Safira et al., 2019). Pariwisata halal sudah banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia bahkan negara yang bukan berpenduduk mayoritas muslim seperti Jepang. Pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi kedua dalam pariwisata halal bersama dengan Uni Emirat Arab, sedangkan yang menempati urutan pertama yaitu Malaysia (Mansyurah, 2019). Pelaksanaan pariwisata halal memiliki produk barang, jasa, maupun objek wisata pada umumnya mirip dengan wisata konvensional selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa wisata halal merupakan wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai dan syariat Islam (Musyafah et al., 2020)

Adanya konsep pariwisata halal di Indonesia menjadikan terbentuknya aspek wisata yang menerapkan konsep syariah, salah satunya yaitu destinasi wisata syariah. Menurut fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, pengertian destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Trend wisata halal sudah mulai berkembang di dunia, begitu pula di Indonesia. Banyak daerah di

Indonesia yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata halal salah satunya yaitu Yogyakarta.

Kampung Kauman yang terletak di tengah-tengah Kota Yogyakarta memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata halal. Letaknya yang strategis berada di dekat Alun-alun Utara dan Kraton Yogyakarta. Kampung Kauman memiliki nilai sejarah yang cukup terkenal yaitu sebagai tempat berdirinya organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dan terdapat Masjid Gedhe yang menjadi salah satu tujuan utama wisatawan apabila datang ke Yogyakarta. Selain itu juga mungkin masih terdapat objek wisata lain yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas yang bisa dijadikan potensi wisata dari Kampung Kauman.

Berdasarkan potensi wisata yang dimiliki Kampung Kauman, destinasi ini cocok untuk dijadikan tujuan wisata halal. Sebuah wisata pasti membutuhkan adanya pengelolaan terutama dari pemerintah daerah untuk dapat mengelola destinasi wisata tersebut menjadi destinasi wisata halal. Selain berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata halal, Kampung Kauman juga berpotensi untuk menjadi kampung wisata yang mandiri.

Kampung wisata merupakan suatu wilayah dimana penduduknya memiliki kegiatan di bidang sosial dan ekonomi yang ebrbentuk pengembangan usaha pariwisata berbasis potensi daya tarik alam maupun buatan termasuk di dalamnya bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta

kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi (Yogyakarta, 2020). Kampung Kauman termasuk dalam 17 kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta. 17 kampung wisata tersebut antara lain:

1. Kampung Wisata Prenggan
2. Kampung Wisata Tamansari
3. Kampung Wisata Cokrodiningratan
4. Kampung Wisata Warungboto
5. Kampung Wisata Rejowinangun
6. Kampung Wisata Sayidan
7. Kampung Wisata Dewo Bronto
8. Kampung Wisata Pakualaman
9. Kampung Wisata Pandeyan
10. Kampung Wisata Niti Gedongkiwo
11. Kampung Wisata Becak Maju
12. Kampung Wisata Kadipaten
13. Kampung Wisata Sosromenduran
14. Kampung Wisata Kauman
15. Kampung Wisata Tahunan
16. Kampung Wisata Purbayan
17. Kampung Wisata Dipowinatan

Namun untuk saat ini Kampung Kauman masih belum termasuk dalam kategori kampung wisata yang mandiri. Selain itu masa pandemi seperti sekarang ini menyebabkan penurunan jumlah wisatawan di berbagai

obyek wisata, begitu pula dengan wisata Kampung Kauman. Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan pariwisata memiliki peran yang sangat penting (Millatina et al., 2019). Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam menyusun strategi yang tepat bagi Kampung Kauman. Perumusan strategi dapat menggunakan analisis SWOT untuk melakukan pengamatan internal dan eksternal. Pengamatan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengamatan eksternal untuk mengetahui kesempatan dan ancaman. Penggunaan analisis SWOT dapat mempermudah pemerintah dalam menentukan strategi yang tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu dirumuskan sebuah masalah terlebih dahulu supaya penelitian dapat berlangsung tepat pada sasaran obyek yang telah ditargetkan dan tujuan utama dari penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu **“Bagaimana strategi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam pengelolaan wisata halal Kampung Kauman tahun 2018 hingga 2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu **“Mengetahui strategi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam pengelolaan wisata halal Kampung Kauman pada tahun 2018 hingga 2020.”**

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai strategi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam pengelolaan wisata halal Kampung Kauman, menjadi sumber informasi bagi peneliti yang melakukan penelitian mengenai tata kelola pariwisata halal, serta berkontribusi dalam ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa: hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi instansi pemerintah: hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai sumber informasi, gambaran, serta masukan mengenai pengelolaan destinasi wisata dalam pelaksanaan pariwisata halal.
3. Bagi masyarakat umum: hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan destinasi wisata halal.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berikut ini akan dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian terdahulu. Pembahasan yang diejlaskan tentunya masih memiliki pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang pada penelitian ini. Tinjauan pustaka tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tinjauan Pustaka

No.	Judul	Nama Penulis	Hasil Temuan
1.	Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia	(Millatina et al., 2019)	Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama dalam meningkatkan potensi wisata halal yaitu pembangunan (<i>development</i>), perencanaan (<i>planning</i>), pengeluaran kebijakan (<i>policy</i>), serta pembuatan dan penegakan peraturan (<i>regulation</i>).
2.	Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek	(Jaelani, 2017)	Wisata halal di Indonesia memiliki prospek yang baik apabila pemerintah dapat mengelolanya dengan baik. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan wisata halal yaitu melalui pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata.
3.	Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Propinsi Sumatera Utara	(Suparmin & Yusrizal, 2018)	Kota Medan dinilai sudah siap sebagai destinasi wisata halal, sedangkan Kota Parapat masih belum terlalu siap dan masih butuh upaya pengembangan. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan wisata halal di Kota Medan dan Kota Parapat yaitu menyusun Perda atau Peraturan Walikota yang memuat wisata halal di dalamnya, memberikan pedoman penyelenggaraan usaha halal serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapat sertifikasi halal.

4.	Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Pusat Pariwisata Halal Dunia	(Musyafah et al., 2020)	Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri pariwisata halal nasional dilakukan antara lain dengan 1) Membuat pengaturan dan arah politik hukum pengembangan pariwisata halal di Indonesia; 2) Implementasi kebijakan pengelolaan wisata halal Indonesia menuju pariwisata berbasis nilai syariah di dunia.
5.	Strategi Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam Mengembangkan Obyek Wisata Halal	(Budiman et al., 2020)	Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Langsa untuk mengembangkan obyek wisata halal adalah sebagai berikut: 1) merealisasikan ide-ide dari Kepala Daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan masyarakat setempat, 2) merealisasikan ide dengan melakukan metode pembangunan berkelanjutan, 3) mengembangkan obyek wisata hutan mangrove dan hutan kota sebagai destinasi utama, 4) memberikan manfaat pada masyarakat dengan keberadaan obyek wisata halal, 5) menjamin bahwa seluruh obyek wisata berbasis syariah, 6) melakukan promosi lewat media sosial dan media cetak serta melakukan pemasaran destinasi wisata dengan cara mengikuti ajang Pesona Indonesia dan kegiatan di tingkat nasional maupun internasional, 7) membangun kesadaran bagi masyarakat untuk memuliakan wisatawan.
6.	Analisis Pengelolaan Pariwisata Halal	(Anwar et al., 2020)	Pengelolaan pariwisata halal di Desa Tete Batu terbagi menjadi 3 aspek yaitu perencanaan,

	Di Desa Tete Batu Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat		pelaksanaan, dan pengawasan. Proses perencanaan pada pengelolaan konsep wisata halal di Desa Tete Batu cukup lancar karena masyarakat desa mayoritas beragama Islam sehingga sudah banyak dilakukan standarisasi wisata halal. Dalam proses pelaksanaan, strategi mendasar dalam pengelolaan pariwisata di Desa Tete Batu adalah adanya kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dari segi konsep halal, pengelolaan pariwisata Desa Tete Batu sudah banyak yang sesuai standarisasi konsep pariwisata halal sesuai Perda No. 2 tahun 2016. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2016. Dari konteks pengawasan, fokusnya terletak pada pelaksanaan standarisasi pariwisata halal dan lebih jauh lagi pada evaluasi pencapaian tujuan brand pariwisata halal adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di NTB dan lebih khusus lagi di Desa Tete Batu.
7.	Peran Tim Kreatif Wisata Halal Dalam Meningkatkan Wisatawan Di Islamic Center Nusa Tenggara Barat	(Ulfa, 2018)	Beberapa cara yang dilakukan oleh tim kreatif wisata halal yaitu: 1) menyelenggarakan event-event keagamaan, sosial, dan budaya, 2) menyelenggarakan kegiatan kajian rutin, 3) pelayanan pemanfaatan fasilitas Islamic Center Nusa Tenggara Barat, 4) mengekspos informasi lengkap melalui media.

8.	Peran Strategis Dinas Pariwisata Dan Biro Perjalanan Wisata Dalam Mengoptimalkan Pariwisata Halal Di Kota Solo	(Isyah, 2017)	Pariwisata halal di Kota mendapat respon yang baik dari pemerintah. Keberadaan pariwisata halal masuk ke dalam program kerja seksi pengembangan industri pariwisata. Pemerintah memberikan dukungan dengan menyediakan sarana prasarana, melakukan sosialisasi, promosi serta bekerja sama dengan badan sertifikasi halal MUI dan biro perjalanan wisata. Peran biro perjalanan berupa menyediakan fasilitas tour, mendukung program pemerintah dan mempromosikan paket wisata halal hingga ke luar daerah. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam strategi optimalisasi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wisata halal, adanya persaingan, dan rendahnya antusias pengelola objek wisata.
9.	Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal	(Hermawan, 2019)	Pemerintah Indonesia membangun 3 aspek strategi dalam meningkatkan kualitas wisata halal kelas dunia antara lain pada aspek destinasi dengan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Strategi yang kedua dengan memanfaatkan sistem digital yang mudah dijangkau agar penawaran wisata sampai ke internasional. Strategi yang ketiga yaitu peningkatan sumber daya manusia.
10.	Strategi Pengembangan Pariwisata	(Gustiar et al., 2018)	Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/2016 destinasi wisata diarahkan

	Syariah Sesuai Fatwa DSN- MUI No: 108/DSN-MUI 2016 di Kabupaten Bandung Barat		untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan penyegaran, menjaga keamanan, menjaga lingkungan serta menghormati nilai budaya. Selain itu wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak, menjamin kehalalan makanan dan minuman, serta atraksi yang terdapat di destinasi wisata terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Pelaksanaan pariwisata di Kabupaten Bandung Timur sudah sesuai dengan Fatwa MUI, atraksi yang disediakan tidak bertentangan dengan syariah dan memiliki tujuan sebagai hiburan, akan tetapi dari segi penyediaan fasilitas ibadah masih kurang layak. Perlu adanya peningkatan dari segi amenities seperti adanya tempat penukaran uang serta peningkatan dari segi fasilitas pendukung yaitu ketersediaan sarana untuk beribadah.
--	---	--	---

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi wisata halal berupa penyusunan regulasi terkait pelaksanaan wisata halal, melakukan inovasi dan promosi objek wisata halal. Pada penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya berupa objek penelitian yaitu Kampung Kauman yang memiliki nilai historis. Pembaruan yang dilakukan yaitu meneliti bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota

Yogyakarta dalam mengelola wisata historis dengan penerapan konsep wisata halal.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Pariwisata Halal

Pariwisata halal memiliki beberapa penyebutan lain seperti *halal friendly*, *halal lifestyle*, *islamic tourism*, dan lain sebagainya. Namun, pada hakikatnya pariwisata halal adalah pariwisata yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Pengertian wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang dilaksanakan pada 30 Oktober sampai 2 November 2013 yang bertempat di Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Jakarta, President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menjelaskan bahwa, “wisata halal merupakan konsep baru pariwisata dan bukan berupa wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan gaya liburan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim” (Jaelani, 2017).

Definisi lain dari pariwisata halal menurut World Travel Market yaitu bentuk pariwisata religius yang mewakili kepatuhan dan ketaatan terhadap ajaran Islam (Millatina et al., 2019).

Wisata halal bukan merupakan wisata yang eksklusif karena semua orang baik muslim maupun non-muslim dapat menikmati pelayanan berdasarkan nilai-nilai halal. Wisata halal tidak hanya meliputi destinasi ziarah dan religi, tetapi juga mencakup ketersediaan fasilitas pendukung,

seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat salat (Adriani dalam Sari et al., 2019).

1.6.2. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi menurut (Anwar Arifin dalam Setiaji, 2018) adalah tindakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Maka bisa dikatakan bahwa strategi merupakan tahapan yang harus dilalui agar target sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Strategi yang baik akan memberikan gambaran mengenai tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk meraih tujuan yang ingin dicapai.

Pendapat lain menjelaskan strategi merupakan sebuah penentuan sasaran jangka panjang untuk suatu organisasi, oleh karena itu dibutuhkan aksi serta alokasi sumber daya agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai (Kuncoro dalam Oktaviani, 2019)

Strategi merupakan upaya yang di dalamnya terdapat kebijakan umum, kebijakan teknis serta operasional guna mencapai tujuan yang telah disepakati (Setiawan dalam Novitasari, 2019)

b. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses pembuatan keputusan strategis serta mengalokasikan sumber daya yang mendukung pada seluruh unit kerja dan tingkatan dalam organisasi (Zaenuri, 2012). Proses manajemen strategis menurut (Wheelen dan Hunger dalam Zaenuri, 2012) meliputi 4 hal, yaitu:

1. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan terdiri dari pengamatan internal dan eksternal. Pengamatan internal dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengamatan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman. Pengamatan tersebut biasanya disebut faktor-faktor strategis atau biasa disebut SWOT yang berarti *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), *Threats* (ancaman). Berdasarkan analisis SWOT dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang efektif adalah yang memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman (Oktaviani, 2019). Untuk lebih mudahnya akan dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1. 2

Matriks SWOT

	<i>Strengths</i> (kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (kelemahan)
<i>Opportunities</i> (kesempatan)	Strategi S-O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
<i>Threats</i> (ancaman)	Strategi S-T Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Mengurangi kelemahan agar terhindar dari ancaman

Sumber: Hunger dan Wheelen (dalam Oktaviani, 2019)

2. Perumusan Strategi

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis kemudian merumuskan strategi. Hal yang pertama kali dilakukan dalam perumusan strategi yaitu pernyataan misi, hal ini sangat penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Kemudian menentukan misi organisasi, tujuan yang akan dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan kebijakan.

3. Implementasi Strategi

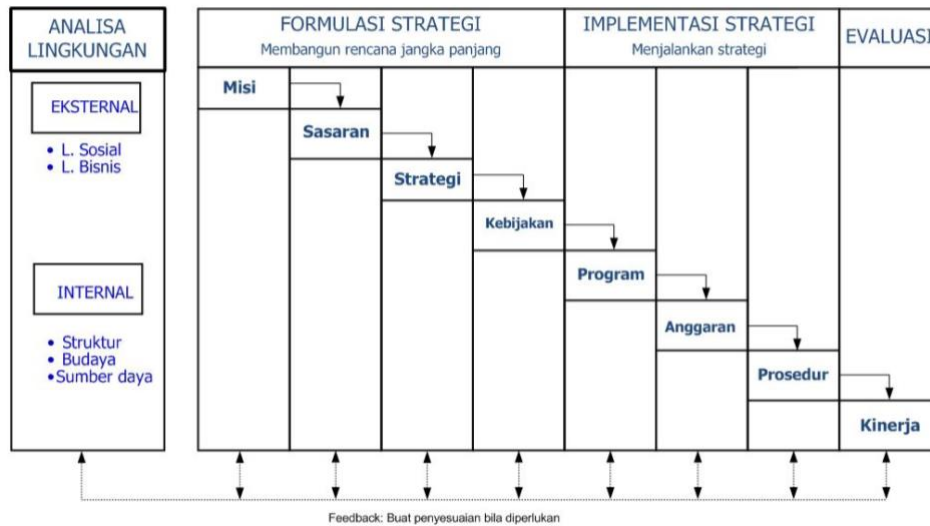
Implementasi strategi sering juga disebut dengan tahap tindakan manajemen. Strategi dapat diimplementasikan melalui program, anggaran, dan prosedur.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja yang bertujuan untuk memastikan ketepatan dalam pengendalian aktivitas organisasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara kinerja dengan tujuan maka harus segera ditindaklanjuti serta dicari solusi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan perencanaan strategisnya. Proses manajemen strategis menurut Hunger dan Wheleen dapat dijelaskan lebih singkat melalui bagan berikut:

Bagan 1. 1

Model Manajemen Strategi



Sumber: Hunger dan Wheelen

Adapun konsep strategi pengembangan wisata halal yang dilakukan oleh Indonesia menurut (Satriana & Faridah, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Indonesia meningkatkan keberadaan hotel syariah
2. Indonesia melakukan sinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan wisata halal
3. Indonesia berusaha mempromosikan wisata halal yang dimilikinya ke dunia internasional

1.6.3. Pengelolaan

Menurut (Adisasmita dalam Musa, 2020) pengelolaan bukanlah hanya melakukan suatu kegiatan, tetapi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen; semisal perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan dengan harapan agar tujuan tercapai dengan efektif dan efisien.

Manajemen atau yang bisa diartikan sebagai pengelolaan adalah serangkaian proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang terkoordinasi. dalam skala aktifitas, pengertian ini juga bisa dibilang sebagai suatu aktifitas mengatur, berfikir, dan menerbitkan yang dilakukan seseorang, agar mampu untuk mengemukakan, merapikan, dan menata segala hal yang ada disekitarnya dan paham akan prinsip-prinsipnya dan hidup selaras serta serasi dengan yang lainnya (Munir dalam Syahputra, 2017). Menurut (Afifidin dalam Musa, 2020) disebutkan tahapan pengelolaan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 5) Menentukan standar kerja
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) Mengadakan review secara berkala
- 11) Pelaksanaan tahap selanjutnya, berlangsung secara berulang

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1. Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan wisata dengan gaya liburan yang sesuai ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan para traveler muslim, walaupun tujuan utamanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan traveler muslim, wisatawan non muslim tetap bisa menikmatinya.

1.7.2. Strategi

Strategi merupakan faktor yang penting bagi suatu organisasi. Strategi berupa cara yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

1.7.3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.8 Definisi Operasional

Proses manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen terdapat 4 elemen sebagai berikut:

Variabel	Indikator
Pengamatan Lingkungan	Analisis SWOT: 1. <i>Strengths</i> (produk unggulan dan sumber ketrampilan) 2. <i>Weaknesses</i> (keterbatasan pengelolaan pariwisata) 3. <i>Opportunities</i> (peluang pengembangan pariwisata) 4. <i>Threats</i> (faktor penghambat)

	pengembangan pariwisata)
Perumusan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan misi 2. Penentuan tujuan 3. Pengembangan strategi 4. Penetapan kebijakan
Implementasi Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program 2. Penetapan anggaran 3. Kesesuaian prosedur
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Denzin & Lincol (dalam Anggito & Setiawan, 2018) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan latar alamiah yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada.

Mayoritas penelitian di bidang sosial menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Nantinya penelitian kualitatif akan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan (Anggito & Setiawan, 2018).

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Kauman dengan pertimbangan di kampung tersebut terdapat beberapa objek wisata yang berpotensi untuk

dijadikan destinasi wisata halal. Oleh hal itu peneliti ingin mengetahui strategi pemerintah dalam mengelola potensi-potensi tersebut dalam pelaksanaan wisata halal.

1.9.3. Unit Analisa Data

Melihat penjelasan diatas maka unit analisa pada penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, pengelola wisata, serta pengunjung Kampung Kauman.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan melalui komunikasi dengan metode tanya jawab langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Syahputra, 2017). Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan untuk mengelola wisata Kampung Kauman. Selain itu dilakukan juga wawancara kepada pihak pengelola wisata dan pengunjung Kampung Kauman untuk mengetahui pelaksanaan dari strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap informasi yang dikumpulkan melalui wawancara (Sopari, Oka, dan Salman 2014 dalam Musa, 2020). Dokumen merupakan tulisan yang tidak disiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu (Suwendra, 2018). Sumber data dokumentasi

berupa arsip, jurnal, foto-foto, media massa cetak, dokumen resmi, dan lain sebagainya.

1.9.5. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan tiga tahapan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu menyederhankan dan memfokuskan data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilah serta memfokuskan pada satu tujuan agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih mudah dimengerti.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian menggunakan teks naratif disertai dengan foto atau gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Melalui data yang sudah diperoleh, peneliti melakukan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa mengalami perubahan, akan tetapi apabila kesimpulan awal disertai dengan data yang valid maka kesimpulan tersebut dapat bersifat tetap. Oleh karena itu, kesimpulan yang dibuat dapat memecahkan rumusan masalah serta tujuan penelitian dapat tercapai.